

PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI SUMATERA BARAT OLEH BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH SUMBAR

***Riri Ulfa Hidayah¹ & Siska Sasmita²**

^{1,2}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Email Korespondensi: ririulfa37@gmail.com

ABSTRAK

Pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan fisik merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Namun, di Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumatera Barat, proses pengawasan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran perjalanan dinas, minimnya ASN bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), belum optimalnya koordinasi dengan OPD pelaksana, serta faktor eksternal seperti cuaca ekstrem dan ketidaksiapan lahan. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya intensitas monitoring lapangan dan terbatasnya verifikasi teknis secara langsung, sehingga potensi penyimpangan sulit terdeteksi sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengawasan yang dilakukan Biro Administrasi Pembangunan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, guna merumuskan rekomendasi perbaikan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat biro, pegawai teknis, dan pihak terkait, serta studi dokumentasi terhadap laporan pelaksanaan proyek, kebijakan pengawasan, dan hasil rapat evaluasi. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengungkap pola pelaksanaan pengawasan dan kendala yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu sistem pelaporan digital menggunakan Simbangda, rapat evaluasi berkala lintas instansi, serta monitoring dan evaluasi (MONEV) lapangan. Meskipun ketiga instrumen ini telah berjalan sesuai prosedur, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan SDM bersertifikat PBJ, pemangkasan anggaran MONEV sejak 2022, serta ketidakdisiplinan rekanan dalam penyampaian dokumen. Rekomendasi yang diusulkan meliputi peningkatan anggaran pengawasan, percepatan sertifikasi PBJ bagi ASN, penyusunan SOP pengawasan yang terstandar, dan penguatan sanksi terhadap rekanan yang tidak patuh.

Keyword: Pengawasan, Pembangunan Fisik, Biro Administrasi Pembangunan

PENDAHULUAN

Pembangunan fisik di Sumatera Barat merupakan prioritas utama pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendung, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum lainnya menjadi fokus utama dalam mendukung aktivitas sosial-ekonomi. Peran Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumbar sangat penting dalam memastikan proyek berjalan sesuai rencana, baik dari segi administrasi, anggaran, maupun kualitas fisik. Biro ini berfungsi melakukan koordinasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan yang berlaku (Bappeda Sumatera Barat, 2021).

Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumbar, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2021, memiliki tugas pokok membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pengendalian administrasi

pembangunan daerah dan wilayah. Dalam pelaksanaan tugasnya, biro ini bekerja sama dengan berbagai pihak pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan pembangunan. Kerja sama intensif dilakukan dalam koordinasi lintas perangkat daerah, audit eksternal, verifikasi lapangan, penyusunan kebijakan, serta penyelesaian masalah, yang seluruhnya berlangsung secara berkelanjutan dan terjadwal sesuai kebutuhan pengawasan dan pengelolaan pembangunan.

Berikut gambaran ringkas proyek pembangunan yang dilaksanakan di Sumatera Barat (Sumbar) pada tahun 2021-2023:

1. Infrastruktur Umum

Tabel 1. Daftar Pembangunan Infrastruktur Umum

Jenis Proyek	Periode	Keterangan
Pembangunan/Rekonstruksi Jalan Provinsi	2021-2023	Ruas Padang Aro, Sei Dareh, Alahan Panjang, dll
Pembangunan Jembatan	2021-2023	Jembatan Sikali, Batu Bala
Rehabilitasi/Pembangunan Bendung & Irigasi	2021-2022	DI Ladang Laweh, DI Batang Gumarang
Pembangunan Stadion Utama Sumbar	2021-2022	Tahap VII
Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar	2021-2022	Putus kontrak, dilanjutkan tahun berikutnya

2. Pendidikan

Tabel 2. Daftar Pembangunan Fasilitas Pendidikan

Jenis Proyek	Periode	Keterangan
Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB)	2021-2023	SMAN 1, SMAN 3, SMAN 4, dll
Pembangunan Laboratorium (Kimia, Biologi, Komputer)	2021-2023	SMAN dan SMKN se-Sumbar
Pembangunan Asrama Siswa	2021	SMAN 3 Sumbar, SMA 2 Harau
Pembangunan Toilet (Jamban)	2021-2023	Fisik reguler SMK dan SMA
Pembangunan Lapangan, Aula, Pagar, Pos Jaga	2021-2023	Puluhan unit sekolah
Pengadaan Kendaraan Operasional Sekolah	2021	Bus roda 4, banyak tidak terlaksana
Perencanaan & Pengawasan Teknis Sekolah	2021-2023	Dokumen DED, pengawasan pembangunan fisik sekolah

3. Sarana dan Prasarana

Tabel 3. Daftar Pembangunan Sarana dan Prasarana

Jenis Proyek	Periode	Keterangan
Rehabilitasi Gedung, Rumah Dinas, dan Pagar Kantor	2021-2023	Sekretariat DPRD dan kantor-kantor OPD

4. Perikanan dan Kehutanan

Tabel 4. Daftar Pembangunan Perikanan dan Kehutanan

Jenis Proyek	Periode	Keterangan
Pembangunan Tambak Udang	2022	Budidaya air tawar dan payau
Pembangunan Pabrik Es, Sumur Bor, Air Bersih	2022	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar

5. Penanggulangan bencana

Tabel 5. Daftar Pembangunan Penanggulangan Bencana

Jenis Proyek	Periode	Keterangan
Pembangunan Shelter Tsunami	2021-2023	SDN 2 Maligi dan kawasan rawan bencana lainnya

Hasil wawancara dengan pihak Biro mengungkapkan bahwa hambatan pengawasan mencakup keterbatasan SDM bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), hanya 7 dari 27 ASN yang memiliki sertifikat, keterlambatan rekanan dalam menyerahkan dokumen pencairan, serta keterbatasan anggaran untuk monitoring dan evaluasi. Efisiensi anggaran perjalanan dinas pada 2022-2023 semakin mempersempit ruang gerak money, sehingga pengawasan di lapangan tidak maksimal.

Tabel 6. Daftar nama ASN Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumbar pemilik sertifikat kompetensi PBJ tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Biro	1 Orang
2	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Orang
3	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Orang
4	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Orang
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 Orang
6	Analisis Pembangunan	1 Orang
7	Perencana Ahli Muda	1 Orang

Hal ini berdampak pada keterlambatan penyelesaian proyek dan penurunan kualitas hasil pembangunan. Namun, pelaksanaan proyek pembangunan fisik sering kali menghadapi berbagai masalah. Hal tersebut dibuktikan dari data proyek pembangunan fisik yang diawasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumbar yang bermasalah selama kurun waktu 2021 sampai 2023 pada Tabel berikut :

Tabel 7. Data pelaksanaan proyek pembangunan fisik yang terkendala di Sumbar pada tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah proyek	Keterangan							
		Selesai sesuai kontrak	Tidak Sesuai Kontrak/Tertunda						
			Putus kontrak	Tidak terlaksana	Lewat tahun	gagal	Dilaksanak an sebagian	PHO belum terbayarkan	Belum dibayarkan
2021	1117	897	10	19	49	0	0	18	124
2022	1613	1586	0	0	27	0	0	0	0
2023	1707	1623	1	52	14	3	3	0	11

Pengawasan yang efektif menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Proses ini mencakup monitoring dan evaluasi terhadap aspek administrasi dan fisik proyek untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis, volume, waktu penyelesaian, dan anggaran. Namun, data tahun 2021-2023 menunjukkan masih adanya proyek bermasalah, mulai dari keterlambatan, putus kontrak, hingga pembayaran yang tertunda. Misalnya, pada 2021 terdapat 220 proyek bermasalah (19,7%), 2022 sebanyak 27 proyek (1,67%), dan 2023 naik menjadi 84 proyek (4,92%).

Kendala lain yang dihadapi adalah adanya ketidaksesuaian realisasi fisik dan keuangan dibandingkan target rencana. Beberapa rekanan mengalami kekurangan dana di tengah pengerjaan meskipun telah menerima uang muka. Keterlambatan pencairan pembayaran akibat kelalaian administrasi juga menimbulkan masalah pembayaran lewat tahun anggaran. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan ketepatan waktu, kepatuhan terhadap kontrak, serta penguatan mekanisme pengawasan.

Dibandingkan provinsi lain, Sumatera Barat masih tertinggal dalam jumlah SDM bersertifikat PBJ, yang secara nasional mencapai rata-rata pemenuhan jabatan fungsional 41,22% dan sertifikasi PPK 48,63%. Kekurangan tenaga bersertifikat berimplikasi langsung terhadap kualitas pengawasan dan efektivitas pengendalian proyek. Lemahnya koordinasi antar instansi pengawas turut memengaruhi sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis proses pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumbar, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan penguatan sistem pengawasan, diharapkan proyek pembangunan dapat selesai tepat waktu, sesuai standar teknis, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang menekankan pada pengamatan langsung terhadap kondisi alamiah objek penelitian tanpa memanipulasi variabel, dengan peneliti sebagai instrumen utama serta menggunakan triangulasi dalam pengumpulan data. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang sistematis, menyeluruh, dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Fokus penelitian diarahkan pada pembangunan fisik yang diawasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada periode 2021–2023, yang dipilih karena merupakan awal pelaksanaan Renstra pembangunan daerah dan mencerminkan dinamika kebijakan terbaru, sekaligus memuat tantangan teknis, administratif, dan sumber daya pelaksana. Lokasi penelitian berada di Kota Padang, tepatnya di Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumbar, dengan pertimbangan bahwa instansi ini memegang tanggung jawab utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan di provinsi tersebut.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer melalui wawancara langsung dengan ASN di Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumbar, baik yang memiliki sertifikat PBJ maupun yang tidak, serta observasi lapangan, dan data sekunder yang berasal dari studi dokumentasi seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen kegiatan pengawasan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, dengan alat bantu berupa buku catatan dan perekam untuk memastikan kelengkapan informasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan jawaban antar informan dan dokumen pendukung. Analisis data dilakukan mengikuti model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, di mana data hasil wawancara dan dokumentasi dikelompokkan sesuai dimensi penelitian, disajikan dalam bentuk narasi, lalu diverifikasi untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Proses Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Fisik oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumbar

Pengawasan dilaksanakan melalui tiga komponen utama, yaitu sistem pelaporan digital, rapat evaluasi berkala, dan monitoring evaluasi (MONEV) ke lapangan :

1. Sistem Pelaporan Digital

SIMBANGDA merupakan aplikasi yang dirancang untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Aplikasi SIMBANGDA (Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah) adalah sistem informasi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengelola dan memantau pembangunan daerah. Sistem ini terintegrasi dengan Dashboard Pembangunan Sumbar, sebuah platform terbuka yang memungkinkan publik untuk memantau perkembangan pembangunan. SIMBANGDA digunakan untuk mencatat dan memproses data anggaran, program, kegiatan, dan progres pembangunan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.



Gambar 1
 Tampilan Realisasi Belanja OPD di Simbangda Provinsi Sumatera Barat

Salah satu instrumen penting yang digunakan adalah pelaporan rutin dari OPD teknis melalui aplikasi Simbangda, di mana setiap OPD diwajibkan menyampaikan laporan bulanan yang memuat progres realisasi fisik. Seperti dijelaskan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sumbar, Ibu Ria Wijayanti, S.T., M.Si:

« ...Monev itu kita laksanakan baik saat proyek sedang berjalan maupun setelah pelaksanaannya selesai. Selain Monev di lapangan, kita juga melakukan evaluasi rutin setiap bulan melalui rapat bersama kepala OPD. Dari Simbangda, setiap bulan keluar data untuk dilihat apakah pelaksanaan proyek tersebut sesuai atau tidak. Data itu kemudian dinilai secara fisik, dan kalau ada bahan atau laporan yang tidak sesuai aturan misalnya menyatakan ada rapat tapi bukti kegiatannya tidak ada maka tidak dianggap sebagai evidence yang sah. Setelah penilaian selesai, hasil realisasi fisik dikumulatifkan per bulan, dan dari situ ditentukan peringkat masing-masing OPD...» (Wawancara pada 14 Juli 2025)

Selain melaporkan progres fisik pembangunan, sistem pengawasan yang diterapkan oleh Biro Administrasi Pembangunan juga mewajibkan setiap OPD teknis untuk menyampaikan laporan realisasi keuangan secara berkala. Pelaporan ini dilakukan melalui platform digital Simbangda, yang dirancang untuk merekam dan menilai sejauh mana penggunaan anggaran berjalan selaras dengan rencana kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Analisis Kebijakan Ahli Muda, bapak Febi Fortuna, S.STP:

“Di Simbangda itu laporannya dua macam, laporan fisik, laporan keuangan. Di situ ada datanya seluruhnya.” (Wawancara pada 15 Juli 2025)

SIMBAGDA juga berfungsi untuk melaporkan evidenti berupa foto kegiatan, dokumen berita acara dan laporan tertulis, Seperti dijelaskan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sumbar, Ibu Ria Wijayanti, S.T., M.Si:

“...setiap bulan kan kita ada rapat kepala OPD... yang di sini kan kita ada yang Simbangda... itu kan juga MONEV, dilihat apakah emang terlaksana atau tidak...Jadi itu nanti datanya baru dinilai secara fisiknya, baru bisa dihitung secara fisiknya kalau nanti dia memasukkan bahan tidak sesuai dengan aturan, saya bilang dia rapat, tapi evident yang dimasukkannya tidak evident rapat...” (Wawancara pada 14 Juli 2025)

2. Rapat Evaluasi Berkala

Rapat evaluasi bulanan melibatkan Biro Administrasi Pembangunan, Bappeda, BPKD, Inspektorat, dan OPD pelaksana proyek untuk meninjau kesesuaian realisasi fisik dan keuangan dengan target, mengidentifikasi masalah, serta memberi rekomendasi percepatan bagi proyek yang progresnya rendah, seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sumbar, Ibu Ria Wijayanti, S.T., M.Si:

“...Itu nanti yang kita bahas di rapat-rapat, per lingkup asisten. Setelah dibahas di tiga asisten, baru dirapatkan dengan kepala daerah, gubernur, atau sekda, untuk melihat dan memitigasi apa masalahnya. Nanti kita rapatkan juga misalnya di Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan, apakah ada kegiatan yang terkendala. Kalau kendalanya soal pencairan, tim BPKD sudah ada di situ juga. Inspektorat pun ikut duduk di rapat ini. Tapi, yang menjadi leading sector sekaligus melaporkannya adalah Biro Administrasi Pembangunan. Semua data itu kemudian dikumulatifkan setiap bulan dan menjadi dasar penentuan peringkat masing-masing OPD....”(Wawancara pada 14 Juli 2025)

3. Monitoring dan Evaluasi (MONEV) ke lapangan

Selain rapat dan sistem pelaporan, Biro juga melakukan MONEV ke lapangan. MONEV ini dilakukan : Sesuai jadwal rutin yang ditetapkan dalam SOP dan atau jika ditemukan deviasi signifikan di laporan bulanan Hal ini disampaikan oleh bapak Ahmad Syarif, S.Pd selaku Pegawai Kontrak Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang menjelaskan jika:

“...Biasanya dari pertengahan sampai akhir (masa pekerjaan), jadi 50% sampai akhir. Cuma mencari 50% itu di aplikasi Simbangda... kalau selesai PBJ itu di bulan Mei, baru turun ke lapangan untuk memonitoring. Tujuannya untuk percepatan agar pekerjaan sesuai rencana....” (Wawancara pada 21 Juli 2025)

Pendapat ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Revan Kovalesky, selaku pegawai kontrak bagian pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah yang mengatakan :

“...Ada tertulis tentang berapa kali untuk MONEV-nya... ada jadwalnya, ada waktunya....kita kan koordinasi semua... yang untuk jalan tendernya sudah, kontraktor sudah jalan, sudah mulai sampai di mana, sudah bisa kita cek... kita cek dari berita acaranya... kita lihat ke lapangan... ini harus percepatan, ini masih kurang, ini harus disegerakan... itu catatan-catatan kita kepada si pelaksana kegiatan...”(Wawancara pada 21 Juli 2025)

4. Tindak lanjut hasil pengawasan

Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah memberikan peringatan atau teguran baik kepada OPD pelaksana maupun kepada pihak rekanan/kontraktor. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap keterlambatan yang lebih besar dan mendorong percepatan penyelesaian

proyek. Seperti dijelaskan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sumbar, Ibu Ria Wijayanti, S.T., M.Si :

“...Kalau sudah hari ke-28 tapi progres baru 30%, berarti belum selesai dan ini bisa jadi masalah dengan rekanan. OPD akan menegur, dan kami juga menyampaikan bahwa pelaksanaannya belum tuntas. Kami berikan catatan seperti harus percepatan, masih kurang, atau perlu disegerakan...”(Wawancara pada 14 Juli 2025)

Selain memberikan peringatan terhadap keterlambatan pelaksanaan, Biro Administrasi Pembangunan juga mengambil langkah strategis berupa rekomendasi percepatan pekerjaan. Rekomendasi ini didasarkan pada hasil analisis data pelaporan dan kunjungan lapangan (MONEV), yang menunjukkan adanya deviasi antara progres aktual dengan target yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kasus, rekomendasi disampaikan dalam bentuk catatan tertulis atau arahan langsung kepada OPD maupun pihak pelaksana agar segera menindaklanjuti temuan tersebut. Seperti dijelaskan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sumbar, Ibu Ria Wijayanti, S.T., M.Si :

“...kita cek dari berita acaranya... kita lihat ke lapangan... ini harus percepatan, ini masih kurang, ini harus disegerakan... itu catatan-catatan kita kepada si pelaksana kegiatan...”(Wawancara pada 14 Juli 2025)

Koordinasi ini difasilitasi melalui forum rapat evaluasi atau pertemuan khusus yang digelar ketika terdapat deviasi signifikan atau hambatan struktural dalam pelaksanaan proyek. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Analisis Kebijakan Ahli Muda, bapak Febi Fortuna, S.STP:

“...nanti kita rapatkan, oh ya Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan, ada nggak kegiatan yang di situ terkendala? Oh iya pencairannya... tim BPKD sudah ada di situ juga. Jadi, Inspektorat pun sudah duduk di sini juga. Tapi, leading sektornya siapa yang akan melaporkannya siapa? Itu dari Biro, ..karena kita duduknya semua kan lintas OPD, apalagi kalau dalam rapat MONEV bulanan itu. Jadi ketika ada masalah di lapangan, kita bisa langsung koordinasi lintas OPD Bappeda, BPKD, Inspektorat... bisa diselesaikan cepat....” (Wawancara pada 15 Juli 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumbar dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, monitoring lapangan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Pengawasan diawali dengan penyusunan rencana monitoring dan evaluasi tahunan berdasarkan daftar proyek fisik dari seluruh OPD, lalu dilaksanakan secara sampling pada proyek prioritas, bernilai anggaran besar, atau berpotensi bermasalah. Monitoring dilakukan oleh tim pengendalian administrasi pembangunan untuk memverifikasi kesesuaian laporan kemajuan dengan kondisi riil di lapangan, mencakup pengecekan fisik, dokumentasi progres, dan kelengkapan dokumen kontrak. Namun, pelaksanaan pengawasan masih terkendala jumlah ASN bersertifikat PBJ yang hanya 7 orang, padahal sertifikasi tersebut menjadi syarat penting untuk memastikan kompetensi pengawas.

Tahap evaluasi dilakukan dengan menganalisis temuan administrasi dan teknis di lapangan. Hasil evaluasi kemudian dibahas dalam rapat internal maupun bersama OPD terkait, dan dilaporkan kepada pimpinan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban, sekaligus dasar rekomendasi perbaikan, pemberian peringatan, atau pembatalan kontrak jika diperlukan. Kendati telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam regulasi internal biro, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh keterbatasan anggaran perjalanan dinas pada 2022–2023 yang mengurangi intensitas

kunjungan lapangan, serta belum optimalnya cakupan proyek yang terpantau secara langsung. Keberhasilan pengawasan sangat dipengaruhi oleh kecukupan SDM kompeten, dukungan anggaran, dan koordinasi yang solid dengan OPD pelaksana.

Hambatan dalam pengawasan pembangunan

1. Keterbatasan Anggaran untuk Kegiatan Pengawasan (Pembiayaan)

Salah satu kendala utama pengawasan adalah terbatasnya anggaran monev akibat efisiensi anggaran perjalanan dinas sejak terbitnya Surat Edaran Gubernur Sumbar 2022, yang mengurangi frekuensi kunjungan lapangan sehingga tidak semua proyek terpantau langsung dan potensi penyimpangan sulit terdeteksi dini, seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sumbar, Ibu Ria Wijayanti, S.T., M.Si :

"..Iya, semenjak ada edaran dari gubernur tentang efisiensi itu, ya otomatis kami juga harus menyesuaikan. Perjalanan dinas itu yang paling terasa. Kadang kita ingin ke lapangan, tapi anggaran terbatas. Jadi kita hanya prioritas ke proyek yang besar atau bermasalah saja, memang idealnya semua proyek dimonitor langsung, tapi karena anggaran perjalanan terbatas, jadi tidak bisa semua. Itu realitasnya...."(Wawancara pada 14 Juli 2025)

2. Hambatan Operasional dalam Pelaksanaan Pengawasan

Secara operasional, Biro Administrasi Pembangunan terkendala kurang optimalnya koordinasi dengan OPD pelaksana, keterlambatan penyampaian laporan progres, serta perbedaan pemahaman pentingnya pelaporan berkala. Ketidadaan prosedur teknis pengawasan yang baku dan terintegrasi juga menimbulkan variasi pendekatan antar proyek, sehingga menurunkan kualitas pengawasan. Seperti yang disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, bapak Syukri Piter Nugraha, S.STP, Mi.Kom, yang mengatakan :

"...Ya itu, kadang laporan dari OPD itu terlambat. Kita sudah tunggu-tunggu di Simbangda, belum masuk juga. Padahal harusnya tiap bulan, supaya bisa kita evaluasi..., "Kalau soal SOP pengawasan, memang belum ada yang betul-betul seragam. Jadi tergantung tim atau siapa yang turun. Belum terstandar semua..."(Wawancara pada 14 Juli 2025)

3. Masalah Ketersediaan dan Spesifikasi Peralatan/Material Proyek

Hasil monitoring lapangan menunjukkan keterlambatan proyek kerap disebabkan keterlambatan penyediaan atau ketidaksesuaian material oleh rekanan, yang baru terungkap karena kurangnya pengawasan teknis intensif. Kondisi ini menegaskan pentingnya keterlibatan pengawas teknis sejak awal pelaksanaan guna menjamin kualitas pembangunan. Seperti dijelaskan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sumbar, Ibu Ria Wijayanti, S.T., M.Si :

"...kadang masalahnya itu bukan hanya di lapangan, tapi juga di penyedia. Bahan materialnya belum datang, atau yang dibawa tidak sesuai dengan spek. Nah, itu kan tidak bisa kita ketahui kalau tidak dicek langsung., "Kami pernah temukan material yang digunakan di proyek jalan tidak sesuai dengan dokumen teknis. Itu ketahuan pas kami turun, dan kami langsung sampaikan ke OPD-nya...."(Wawancara pada 14 Juli 2025)

4. Pengaruh Faktor Eksternal

Selain kendala internal, efektivitas pengawasan juga dipengaruhi faktor eksternal seperti cuaca ekstrem yang menghambat pekerjaan dan akses ke lokasi, perubahan kebijakan anggaran, dinamika politik daerah, serta ketidaksiapan lahan masyarakat, yang semuanya menjadi tantangan bagi kelancaran pembangunan dan pengawasannya. Seperti dijelaskan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sumbar, Ibu Ria Wijayanti, S.T., M.Si :

“...Kadang di lapangan kita sudah siap turun, tapi karena hujan terus, medan jadi susah. Apalagi daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, aksesnya terbatas.., Kita juga pernah tertunda karena lahannya belum clear. Masyarakat belum setuju karena merasa belum ada sosialisasi. Jadi kegiatan pun nggak bisa langsung jalan, Terkadang anggaran juga berubah di tengah jalan. Misalnya sudah dialokasikan, ternyata ada refofusing. Nah, itu bikin rencana awal jadi harus disesuaikan lagi..”
(Wawancara pada 14 Juli 2025)

5. Kelemahan dalam Perencanaan Proyek

Banyak proyek mengalami perencanaan kurang matang, dengan dokumen teknis seperti DED yang belum lengkap atau tidak sesuai kondisi lapangan, sehingga menyulitkan evaluasi karena minimnya standar pembandingan. Seringnya revisi pekerjaan di tengah pelaksanaan juga berdampak pada ketepatan waktu dan volume pekerjaan. Seperti dijelaskan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sumbar, Ibu Ria Wijayanti, S.T., M.Si :

“...Kadang kita temukan, DED-nya belum lengkap atau masih pakai data lama. Begitu dikerjakan di lapangan, ternyata nggak sesuai kondisi. Jadinya revisi lagi, Kalau nggak ada standar dokumen teknis yang jelas, kita di pengawasan juga bingung mau bandingkan dengan apa. Jadi evaluasi itu bisa bias... Sering juga terjadi perubahan pekerjaan di tengah jalan. Volume berubah, atau lokasinya digeser. Itu yang bikin pelaksanaan jadi molor..” (Wawancara pada 14 Juli 2025)

6. Keterbatasan SDM yang Kompeten dan Bersertifikat PBJ

Keterbatasan SDM menjadi tantangan utama pengawasan, khususnya minimnya ASN bersertifikat PBJ. Dari 27 ASN di Biro Administrasi Pembangunan, hanya 7 yang memiliki sertifikat, sehingga beban pengawasan proyek yang cukup banyak setiap tahun bertumpu pada sedikit pegawai yang kompeten. Seperti yang disampaikan oleh bapak Akmal Rusli, SE selaku Analis Pembangunan Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang mengatakan :

“...ASN kita yang belum ada sertifikat di PBJ... nanti tugasnya beda-beda... tapi pasti di dalam satu tim itu nantikan laporannya pergi..., Yang punya sertifikat PBJ memang masih terbatas. Jadi kita andalkan yang itu-itu saja. Bebananya cukup berat karena proyek yang kita awasi tiap tahun cukup banyak..” (Wawancara pada 14 Juli 2025)

7. Keterlambatan Penyampaian Dokumen Pencairan oleh Rekanan

Permasalahan lain yang sering muncul adalah keterlambatan rekanan dalam menyerahkan dokumen pencairan dana, meski sudah diberi surat peringatan. Hal ini menyebabkan keterlambatan pembayaran proyek, bahkan ada yang tidak terbayar pada tahun anggaran berjalan, sehingga memicu berbagai maladministrasi.

Tabel 8
Maladministrasi terkait proses pembangunan

NO	TAHUN LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	DUGAAN MALADMINISTRASI	PERIHAL	KETERANGAN
1	2017	Korban Langsung	LPSE Tanah Datar	Penyimpangan Prosedur	LPSE Tanah Datar dalam pengadaan barang/lelang tender terkait terdapatnya persyaratan yang tidak dikeluarkan oleh Dinaskertrans Sumbar Prov.	Selesai Dan Ditutup
2	2019	Korban Langsung	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan Provinsi Sumateara Barat	Penyimpangan Prosedur	Dibatakannya tender pengadaan barang pelelangan kegiatan perluasan tanaman pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan Provinsi Sumateara Barat setelah dua kali dinyatakan menang tender serta di blacklistnya CV pelapor	Selesai Dan Ditutup
3	2019	Korban Langsung	Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat	Penyimpangan Prosedur	Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat yang menambahkan item pekerjaan pada paket Bridge Management System yang tidak cocok	Selesai Dan Ditutup

Hal ini mengganggu realisasi keuangan dan menimbulkan beban administrasi tambahan pada tahun berikutnya. Seperti dijelaskan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sumbar, Ibu Ria Wijayanti, S.T., M.Si :

“...Sudah kita kirim surat juga ke rekanannya, tapi tetap saja ada yang lambat. Padahal dokumen pencairan itu penting, kalau lewat dari batas waktu, bisa-bisa nggak terbayar di tahun itu.. Ada proyek yang selesai di akhir tahun, tapi karena dokumen mereka lambat diserahkan, kita nggak bisa proses pencairannya. Itu akhirnya jadi beban di tahun berikutnya...” (Wawancara pada 14 Juli 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama pengawasan proyek pembangunan fisik di Sumatera Barat adalah keterbatasan anggaran dan minimnya ASN bersertifikat PBJ. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas sejak terbitnya Surat Edaran Gubernur mengurangi frekuensi monitoring lapangan, membuat pengawasan lebih bersifat administratif dan tidak merata. Sementara itu, hanya 7 dari 27 ASN yang memiliki sertifikat PBJ, sehingga beban pengawasan teknis bertumpu pada sedikit pegawai, membatasi kedalaman evaluasi, dan mengurangi deteksi dini terhadap penyimpangan. Faktor eksternal seperti ketidaksiapan lahan, cuaca ekstrem, dan ketidakdisiplinan rekanan dalam menyerahkan dokumen pencairan dana juga memperburuk efektivitas pengawasan.

Meskipun demikian, penelitian menemukan beberapa kekuatan yang dimiliki Biro Administrasi Pembangunan. Keberadaan SOP resmi dan jadwal rutin monev memastikan proses pengawasan berjalan sistematis dan terstruktur. Koordinasi lintas instansi dengan Bappeda, BPKD, Inspektorat, dan OPD teknis memperkuat pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di lapangan secara kolaboratif. Selain itu, penggunaan aplikasi Simbangda mempermudah pemantauan

realisasi fisik dan keuangan secara real-time, meningkatkan transparansi dan efisiensi meskipun masih ada kendala input data.

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan efektivitas pengawasan memerlukan penguatan anggaran monev, penambahan ASN bersertifikat PBJ, serta penegakan disiplin dan sanksi bagi rekanan yang tidak taat aturan. Optimalisasi teknologi seperti integrasi Simbangda dengan sistem lain juga berpotensi memperluas cakupan dan akurasi pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, Biro Administrasi Pembangunan diharapkan mampu menekan jumlah proyek bermasalah secara konsisten dan menjaga kualitas hasil pembangunan di Sumatera Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan temuan-temuan di lapangan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengawasan pembangunan fisik oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumbar dilakukan melalui tiga komponen utama, yaitu sistem pelaporan digital melalui aplikasi Simbangda, rapat evaluasi berkala, dan monitoring evaluasi (MONEV) lapangan. Simbangda digunakan untuk mencatat progres fisik dan keuangan proyek, disertai evident seperti foto dan berita acara, yang dilaporkan setiap bulan oleh OPD teknis. Data ini menjadi bahan rapat evaluasi bulanan bersama Bappeda, BPKD, Inspektorat, dan OPD pelaksana untuk menilai kesesuaian capaian dengan target, mengidentifikasi kendala, serta memberikan rekomendasi percepatan. MONEV lapangan dilakukan sesuai SOP atau saat ditemukan deviasi signifikan, mencakup pengecekan fisik, dokumentasi progres, dan verifikasi dokumen kontrak. Hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan peringatan, rekomendasi percepatan, atau pembahasan lintas instansi jika hambatan bersifat struktural. Meski prosedur pengawasan telah berjalan sesuai ketentuan, efektivitasnya masih terkendala keterbatasan anggaran perjalanan dinas, minimn
2. Hambatan pengawasan pembangunan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumbar meliputi keterbatasan anggaran monev yang membatasi kunjungan lapangan, koordinasi yang kurang optimal dengan OPD pelaksana, belum adanya prosedur pengawasan baku, serta minimnya SDM bersertifikat PBJ sehingga beban pengawasan hanya ditangani segelintir pegawai. Permasalahan teknis di lapangan seperti keterlambatan atau ketidaksesuaian material, kelemahan perencanaan proyek akibat dokumen teknis yang tidak lengkap atau revisi di tengah pelaksanaan, serta keterlambatan penyampaian dokumen pencairan dana oleh rekanan juga turut menghambat. Faktor eksternal seperti cuaca ekstrem, akses lokasi sulit, perubahan kebijakan anggaran, dinamika politik, dan ketidaksiapan lahan masyarakat semakin memperumit efektivitas pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, N., & Nurjaman, A. (2022). Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd): Pembelajaran Dari Kota Malang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 59-69.
- Chaharani, N. A., & Nurjaman, A. (2022). Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd): Pembelajaran Dari Kota Malang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 59-69.
- Dilapanga, C. S., Laloma, A., & Londa, V. Y. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh Dprd Kabupaten Bolaag Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(90), 1-11.
- Fau, A. A. S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Periode 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 6(2), 60-74.
- Harianti, M., & Azikin, R. (2019). Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik, Unismuh Makasar*, 1(3).
- Harahap, P. A., Harahap, Y., & Nasution, K. K. (2022). Peranan Camat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal LPPM*, 13(2), 34-39.
- Ibrahim, F., Tui, F. P., & Nani, Y. N. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango). *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 91-98.
- La Suhu, B., Ibrahim, A. H. H., Kaunar, A., & Umar, B. (2022). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 Di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan. . *Jurnal Government Of Archipelago-Igoa*, 3(2), 18-23.
- Manurung, R. D. P., & Santosa, A. B. (2019). Akar Yang Menjalar: Peran Emil Salim Dalam Kementerian Pengawasan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia 1972-1983. *Factum: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 8(2), 199-212.
- Melky, M., Lubis, Y. A., & Lubis, K. (2024). Strategi Komisi E DPRD Sumut dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(2), 159-167.
- Mesa, J. B. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Soba Rade Dan Desa Puu Mawo, Kabupaten Sumba Barat (UU NO. 6 TAHUN 2014). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(5).
- Mohulaingo, M., Podungge, R., & Bokingo, A. H. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa Pilohayanga,

- Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 109–115.
- Muazzin. (2021). *Modul 02 : Pemahaman Umum Dan Pengendalian Pekerjaan Konstruksi*. Kementerian PUPR
- Nayanti, D., Affrian, R., & Sugianor, S. (2025). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Balida Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 2(1), 56–65.
- Pangemanan, F., & Lumolos, J. (2020). Partisipasi Organisasi Kepemudaan dalam Pengawasan Pembangunan Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Sam Ratulangi Development Resource Management Review*, 1(1), 42–51.
- Prayitno, D. (2024). Efektivitas Manajemen Organisasi Pelayanan Publik pada Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah B. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, 11(2), 91-106.
- Rodzi, M. F. (2023). Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 3(2), 151–163.
- Rosalina, M. (2013). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Ejurnal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 106-120.
- Royanto, R., Idris, A., & Fitriyah, N. (2019). Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau. *Jurnal Paradigma*, 8(1), 34-43.
- Sagita, R. A., & Amaliatulwalidain, A. (2024). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 9-9.
- Sasmito, J. K. P. Manajemen Proyek Pengawasan Pembangunan Gedung Fakultas Kampus IPDN.
- Sukmana, E., & Islamy, H. (2019). Peranan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 95–109.
- Sunarti, N. (2018). Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 46-55.
- Syafitri, S., Patton, A., & Djumadi, D. (2019). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penggunaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. *Jurnal Paradigma*, 8(2), 78-86.

- Marfuah, U., & Hiadayat, M. Z. (2017). Penerapan Project Control Process dengan Metode Earned Value Manajemen pada Proyek Pengadaan Kelambu Berinsektisida (Studi Kasus PT. Adiwara Worldwide). *JISI: Jurnal Integrasi Sistem Industri*, 4(1), 53-64.
- Vivek Kacha, Ashish Ranjan, Abhishek Tilekar, Apurva Bhagat, Yogesh Misal, Prof. Aakansha Ingle. (2021). Construction Monitoring And Control For Infrastructure Project: A Review. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*. Vol 08 (05). May 2021
- Yudharana, L., Pribadi, T. W., & Arif, M. S. (2017). Perancangan aplikasi berbasis android untuk manajemen proyek pembangunan kapal baru. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), 2-7.
- Zubaidah, S. (2019). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 4(1).